

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN IV

GEDUNG DJUANDA II JL. DR. WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021)3512240, 3449230 (20 SALURAN) PESAWAT 6810 FAX (021) 3844783 SITUS www.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN TENDER DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor: PENG-37/SJ/UKPBJ/POKJA.IV/2021

Kelompok Kerja Pemilihan IV Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Keuangan akan melaksanakan tender dengan pascakualifikasi secara elektronik untuk paket pekerjaan pengadaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket pekerjaan : Paket Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Penambahan Server Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) Tahun 2021
- Lingkup pekerjaan : Menyediakan perangkat server, perangkat lunak dan peralatan pendukungnya untuk menjaga operasional layanan aplikasi MPN G3
- Nilai total HPS : Rp2.648.800.000,00,- (dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Sumber pendanaan : DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.

(untuk usaha perorangan yang memenuhi persyaratan peraturan tentang penerbitan izin perdagangan, tidak diperlukan izin usaha)

- 1) Surat Izin : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 2) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 3) Bidang pekerjaan:
Kode KBLI : 6202 atau 62090 atau 46512 atau 46511
- 4) Kualifikasi usaha: Kecil atau Non Kecil

- b. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- c. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan) tahun 2020

- d. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

- e. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

- 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- 4) Kartu Tanda Penduduk .

- f. Pernyataan Pakta Integritas meliputi:

- 1) Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;

- 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 5) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - 6) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- h. Memiliki pengalaman Penyediaan barang pada Divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- i. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak
- j. Memiliki pengalaman kerja dalam pengadaan/penyediaan perangkat keras atau lunak di perusahaan swasta, BUMN/BUMD atau instansi pemerintah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2016 s.d. 2020
- k. Untuk peserta kualifikasi non kecil wajib Menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir (tahun 2020)
- l. Untuk peserta dengan kualifikasi dengan kualifikasi non kecil Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) paling kecil 50% (lima puluh persen) dari nilai HPS Rp 1.324.400.000,00,- (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)

3. Pelaksanaan Pengadaan

Pengadaan ini dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat *website* LPSE : www.lpse.kemenkeu.go.id

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Dapat dilihat pada *website* LPSE

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 7 Juni 2021

Pokja Pemilihan IV